

STRATEGI MENGATASI URBANISASI DAN MIGRASI DESA-KOTA:

TEORI DAN KEBIJAKAN

Salah satu fenomena demografis sesudah Perang Dunia kedua yang sangat mengejutkan adalah begitu cepatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di berbagai Negara yang sedang berkembang. Pada tahun 1950, baru terdapat 275 juta orang yang tinggal di kota-kota di Negara-negara dunia ketiga atau hanya 38 persen dari 724 juta total penduduk perkotaan di seluruh dunia.

Berdasarkan tren jangka panjang, perbandingan dengan Negara maju dan rangsangan individu yang masih kuat, urbanisasi dan migrasi desa-kota akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Bias perkotaan memicu migrasi namun investasi yang berfokus dibidang pertanian cukup meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan sehingga memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit; kebanyakan daerah alternative yang menjadi perluasan kesempatan kerja cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Lagipula, seiring dengan peningkatan pendidikan di daerah pedesaan, para pekerja memperoleh keterampilan yang diperlukan disamping keinginan yang semakin megebu untuk mencari pekerjaan di kota. Namun migrasi desa-kota sering kali menjadi masalah pelik dari sudut pandang social, khususnya di kota-kota raksasa.

Strategi yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi persoalan migrasi dan kesempatan kerja secara menyeluruh, setidaknya mengandung tujuh elemen utama, yakni:

1. ***Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota.*** Keseimbangan kesempatan ekonomi yang lebih layak antara desa dan kota merupakan suatu unsure penting yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi penanggulangan masalah-masalah pengangguran di desa-desa maupun kota-kota di berbagai Negara-negara berkembang, serta untuk mengurangi migrasi dari desa ke kota. Titik utama dari usaha tersebut harus diletakkan pada pembangunan sector pedesaan, perluasam industry kecil ke seluruh negeri, dan peninjauan kembali orientas kegiatan ekonomi serta investasi social yang ditujukan bagi daerah-daerah pedesaan, yang kesemuanya ini harus dilaksanakan secara integrative atau terpadu.

2. ***Perluasan industry-industri kecil yang padat karya.*** Komposisi atau bauran output sangat mempengaruhi jangkauan (dalam banyak hal, termasuk juga lokasi) kesempatan kerja karena beberapa produk (terutama barang-barang konsumsi pokok) membutuhkan lebih banyak tenaga kerja bagi setiap unit output dan setiap unit modal daripada produk-produk atau barang lainnya. Perluasan industry ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: secara langsung melalui investasi dan penyediaan insentif oleh pihak pemerintah, terutama bagi kegiatan-kegiatan ekonomi di sector informal di perkotaan; dan secara tidak langsung melalui redistribusi pendapatan (yang sudah ada maupun yang berasal dari pertumbuhan ekonomi yang akan datang) kepada orang-orang miskin di desa-desa yang struktur permintaan barang konsumsinya bias dipenuhi oleh produk local (lebih mudah dan padat karya) daripada kebutuhan konsumsi orang-orang kaya (yang sebagian bahkan harus diimpor).

3. ***Penghapusan distorsi harga factor-faktor produksi.*** Kita memiliki cukup banyak bukti yang dapat menunjukkan bahwa upaya-upaya penghilangan distorsi harga factor produksi, terutama melalui penghapusan berbagai subsidi modal dan mengurangi pertumbuhan tingkat upah perkotaan diatas harga pasar, akan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki penggunaan sumber daya modal langka yang tersedia. Akan tetapi bagaimana dan seberapa cepat kebijakan ini harus diterapkan agar berhasil tidaklah terelalu jelas. Lagi pula, implikasinya terhadap arus migrasi harus diketahui secara pasti. Jelasnya, kebijakan koreksi harga saja tidak akan cukup untuk mengubah secara mendasar situasi lapangan kerja saat ini.

4. ***Pemilihan teknologi padat karya yang tepat.*** Salah satu factor utama yang menghambat keberhasilan setiap program penciptaan kesempatan kerja dalam jangka panjang, baik pada sector industry di perkotaan maupun pada sector pertanian di pedesaan, adalah terlalu besarnya ketergantungan teknologi dari Negara-negara berkembang terhadap mesin-mesin dan aneka peralatan canggih (biasanya hemat tenaga kerja) yang diimpor dari Negara-negara maju. Semua Negara-negara berkembang harus melepaskan ketergantungan dan mengalihkan perhatiannya untuk mencari teknologi-teknologi produksi yang tepat guna, sesuai dengan kondisi dasar perekonomian sendiri. Upaya tersebut juga harus dikaitkan dengan program pengembangan perusahaan-perusahaan kecil yang serba padat karya baik di desa maupun di kota.

5. ***Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja.*** Munculnya fenomena “pengangguran berpendidikan” di banyak Negara berkembang mengundang berbagai pertanyaan tentang kelayakan pengembangan pendidikan (khususnya pendidikan tinggi/tingkat universitas) secara besar-besaran, yang terkadang sangat berlebihan. Pendidikan formal kini telah menjadi alat untuk menyeleksi calon pekerja. Karena pekerjaan di sektor modern berkembang lebih cepat daripada jumlah orang yang menyelesaikan pendidikan, maka diperlukan perpanjangan masa penyelesaian studi dan seleksi lebih ketat terhadap para lulusannya.

6. ***Pengurangan laju pertumbuhan penduduk*** melalui upaya pengentasan kemiskinan absolute dan perbaikan distribusi pendapatan, terutama bagi kaum wanita yang disertai dengan penggalakan program-program keluarga berencana dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan. Sudah jelas bahwa setiap upaya pemecahan jangka panjang atas berbagai masalah ketenagakerjaan dan urbanisasi di Negara-negara dunia ketiga harus melibatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.

7. ***Mendesentralisasikan kewenangan ke kota dan daerah sekitarnya.*** Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan ke kabupaten-kabupaten merupakan langkah penting dalam perbaikan kebijakan perkotaan dan peningkatan kualitas pelayanan public. Kondisi kota besar sangat berbeda dengan kota kecil, demikian pula kondisi antara kawasan yang berbeda didalam suatu Negara, dan kebijakan harus dirancang untuk merefleksikan perbedaan-perbedaan ini. Para pejabat setempat mempunyai informasi lebih banyak mengenai kondisi daerah setempat yang selalu berubah dan jika para pejabat daerah diberi tanggung jawab terhadap kinerja keuangan daerahnya dan mengetahui bahwa mereka mempunyai insentif lebih besar untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.